

MASALAH KEMANDIRIAN PETANI SEKITAR WILAYAH HUTAN
DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL
Studi Kasus Di Desa Sirnabaya RPH Wanakarta
Kabupaten Karawang Jawa Barat

Oleh

Saharuddin *)

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dewasa ini kegiatan kehutanan telah bergeser dari penekanan pada aspek "menjaga dan mengamankan hutan" (guardians of the forest) ke arah "lebih mengikutsertakan masyarakat di dalamnya" (more people oriented role) dimana kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang ada di dalamnya dapat dijamin dengan baik (FAO, 1978; World Bank, 1978 dalam Nasendi, 1986). Sejalan dengan itu, di Indonesia ditandai dengan adanya proyek-proyek Perhutanan Sosial di Jawa.

Sampai sejauh mana proyek tersebut telah berhasil, masih memerlukan penelitian secara mendalam, sekalipun di beberapa tempat telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Dalam rangka itulah penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan berbagai hal yang berkaitan dengan masalah kemandirian petani sekitar wilayah hutan dalam rangka pengembangan Perhutanan Sosial.

Masalah

Penelitian pendahuluan di RPH Wanakarta menunjukkan bahwa masih ada hal yang perlu dibenahi dalam pelaksanaan proyek Perhutanan Sosial. Beberapa masalah sebagai hasil penemuan adalah sempitnya lahan sebahagian besar penduduk (50%) sebagai buruh tani, pencurian kayu bakar dan kayu pertukangan, hubungan masyarakat dengan petugas kehutanan

*) Mahasiswa S1 Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian IPB di bawah bimbingan Prof Dr S M P Tjondronegoro

ditandai perasaan antipati masyarakat karena di daerah ini pernah terjadi penyerobotan tanah/tanah sengketa; masyarakat merasa tidak puas akibat adanya pengusiran sekitar tahun 1980-an.

Usaha untuk mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan kehutanan melalui pembentukan KTH ternyata belum dapat memberikan hasil yang memadai. Ketidakstabilan anggota KTH adalah merupakan suatu petunjuk sampai sejauh mana program tersebut telah berhasil.

Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengamati persepsi petugas kehutanan dan petani sekitar wilayah hutan terhadap usaha pengembangan Perhutanan Sosial.
2. Untuk menemukan sejauh mana tingkat kemandirian petani dalam pelaksanaan dan pengembangan Perhutanan Sosial.
3. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor sosial dan ekonomi mana yang mempunyai pengaruh kuat terhadap kemandirian petani anggota KTH dengan non anggota KTH.
4. Untuk mengamati adakah perbedaan tingkat kemandirian petani anggota KTH dengan non anggota KTH.

METODA PENELITIAN

Penelitian bersifat studi kasus. Jadi penemuan penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan untuk daerah atau masyarakat/kelompok tani lainnya. Penelitian ini dapat bersifat evaluatif karena sifatnya menelaah program yang sedang berjalan. Juga dapat pula dikatakan sebagai penelitian dokumentasi karena ada usaha untuk mengungkap dan mengkaji masalah kemandirian.

Data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara (kuesioner) yang telah dipersiapkan sebelumnya. Wawancara dilakukan terhadap 16 petani anggota KTH, 16 petani non anggota KTH dan 2 orang petugas kehutanan serta tokoh-tokoh masyarakat.

Analisa datanya dilakukan dalam dua tingkatan. Pertama pada tingkat kelompok, pengolahan data dilakukan secara prosentase dan dianalisa secara deskriptif. Kedua unit analisa adalah rumah tangga dengan tabulasi silang dan uji statistik jenjang Spearman disertai dengan kesimpulan dan penafsirannya.

Untuk melengkapi kedua model analisa di atas, maka diambil masing-masing 4 studi kasus rumah tangga dari rumah tangga anggota KTH dan rumah tangga non anggota KTH. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas masalah kemandirian pada tingkat rumah tangga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Proyek Perhutanan Sosial

Pilot proyek Perhutanan Sosial Blok Cileutik tampaknya kurang didukung oleh sikap masyarakatnya. Mudah dimengerti karena sejarah pengembangan proyek ini diwarnai oleh adanya sengketa tanah antara masyarakat dengan pihak Perum Perhutani. Implikasi dari adanya sengketa tersebut adalah sampai saat ini antipati masyarakat terhadap proyek Perhutanan Sosial masih tetap ada.

Pilot proyek Perhutanan Sosial Blok Cileutik luasnya 10 Ha yang digarap oleh 20 KK anggota KTH. Sampai saat ini proyek tersebut telah berlangsung kurang lebih 3 tahun dengan tanaman pokok kehutanan adalah *Acacia mangium*. Di beberapa bagian terdapat tanaman pengisi lamtoro gung dan tanaman pagar adalah nanas.

Gejala kurangnya simpati masyarakat sekitar hutan atas program ini ditandai dengan kurangnya minat masyarakat sekitar hutan untuk menggarap di lokasi Perhutanan Sosial. Ketidakstabilan anggota KTH merupakan salah satu petunjuk adanya gejala di atas. Beberapa anggota KTH mengundurkan diri dengan alasan : (1). Ketidakmampuan petani dalam mengembalikan kredit. (2). Tidak senang pada petugas kehutanan. (3). Adanya kesempatan baru untuk melakukan tumpangsari di RPH Pinayungan (tidak jauh dari Blok Cileutik) dengan pembentukan Kelompok Tani Hutan Tanaman Industri.

Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini diajukan 7 buah hipotesis. Untuk hipotesis 1 dan hipotesis 2 hanya dianalisa secara deskriptif dengan pengolahan data secara prosentase. Sedangkan untuk hipotesis 3 sampai hipotesis 7 data dianalisa dengan tabulasi silang dan uji Jenjang Spearman.

1. Hasil Analisa Terhadap Hipotesis 1 (mengenai persepsi petani dan petugas kehutanan)

Persepsi petugas kehutanan terhadap Perhutanan Sosial lebih berorientasi kepada usaha-usaha pendayagunaan

sumber daya hutan secara lestari. Implikasinya adalah pandangan terhadap proyek Perhutanan Sosial lebih dikaitkan dengan usaha untuk mencapai target reboasasi di tanah negara sebagai suatu program yang berasal dari hirarki yang lebih tinggi. Untuk itu pembinaan KTH lebih berorientasi kepada usaha peningkatan ketrampilan petani dalam menanam tanaman pokok kehutanan berikut pemeliharannya.

Berbeda dengan petugas kehutanan, persepsi petani sekitar hutan terhadap Perhutanan Sosial dan hutan pada umumnya lebih menekankan pada aspek fungsi hutan sebagai salah satu sumber tambahan pendapatan. Implikasinya adalah adanya kegiatan masyarakat yang sifatnya mengganggu keamanan hutan dalam bentuk pencurian dan perencikan kayu di hutan secara liar. Sedangkan persepsi terhadap petugas kehutanan bersifat negatif.

2. Hasil Analisis Terhadap Hipotesis 2 (mengenai kemandirian petani)

Berdasarkan variabel kemandirian, maka diketemukan bahwa tingkat kemandirian anggota KTH 17.67% lebih besar dari tingkat kemandirian non anggota KTH. Perbedaan tersebut berturut-turut mencolok pada aspek partisipasi, persepsi dan kesadaran petani terhadap Perhutanan Sosial dan terhadap hutan pada umumnya. Sedangkan pada aspek pengetahuan dan ketrampilan perbedaan tersebut relatif kecil.

Perbedaan tersebut dimungkinkan karena arus informasi Perhutanan Sosial dan tentang pentingnya melestarikan lingkungan hutan lebih banyak mengalir kepada anggota KTH dari pada kepada non anggota KTH. Selain itu konflik antara petugas kehutanan dengan petani sekitar hutan yang telah tertanam lama diduga ikut berperan dalam proses di atas.

3. Penemuan Pengujian Hipotesis 3 (mengenai tingkat pendapatan)

Sebahagian besar responden (43.75%) berada pada kategori pendapatan rendah. Ini menjadi alasan bahwa petani banyak terlibat dalam berbagai sektor kegiatan ekonomi.

Penemuan dengan uji statistik Jenjang Spearman menunjukkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh kuat terhadap tingkat kemandirian petani, yaitu bahwa dengan semakin tingginya tingkat pendapatan, perilaku dan persepsi petani terhadap Perhutanan Sosial dan hutan makin positif. Kegiatan yang menjurus pada hal-hal yang sifatnya

tidak menunjang pembangunan bidang kehutanan dapat ditekan atau dihindari.

4. Pengujian Terhadap Hipotesis 4 (mengenai luas lahan)

Menurut Sajogyo (1978), semakin sempit lahan yang dimiliki oleh petani, maka semakin besar arti beragam sumber nafkah di luar pertanian. Berhubung sebahagian besar (56.25%) petani responden berada pada kategori lahan sempit, maka bagi golongan ini tidak bisa menggantungkan nasibnya pada sektor pertanian. Berkenaan dengan itu, sektor kegiatan ekonomi menjadi beragam dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya.

Penemuan melalui uji statistik Jenjang Spearman menyimpulkan bahwa luas lahan yang diusahakan ternyata kuat berpengaruh terhadap proses kemandirian petani. Adanya lahan untuk kegiatan ekonomi berimplikasi pada konsentrasi tenaga kerja keluarga terpusat pada kegiatan usahatani. Dalam kaitan demikian berarti sekaligus mengurangi keterlibatan anggota keluarga yang sifatnya mengganggu kelestarian lingkungan hutan. Bahkan sebaliknya terdapat kasus rumah tangga yang memberi peluang bagi petani untuk menyisihkan sebahagian milik untuk kegiatan usahatani hutan.

5. Hasil Penemuan Terhadap Pengujian Hipotesis 5 (mengenai jumlah tanggungan keluarga)

Sekalipun tanggungan keluarga responden rendah, tetapi ada indikasi bahwa rendahnya tanggungan keluarga disebabkan oleh tingginya perkawinan pada usia muda.

Hasil pengujian melalui uji statistik Jenjang Spearman menunjukkan bahwa jumlah tanggungan keluarga tidak nyata mempengaruhi tingkat kemandirian petani anggota KTH. Pada non anggota KTH pengaruh tersebut kuat. Dengan demikian proses kemandirian anggota KTH tidak dapat dijelaskan dengan variabel jumlah tanggungan keluarga. Ini berarti keterlibatan petani dalam kegiatan langsung di bidang Perhutanan Sosial telah meniadakan pengaruh jumlah tanggungan keluarga terhadap proses kemandirian petani. Hal ini diduga bahwa arus informasi yang diterima oleh anggota KTH tentang hutan dan Perhutanan Sosial telah mampu merubah perilaku dan persepsi petani terhadap Perhutanan Sosial atau terhadap hutan pada umumnya.

6. Hasil Pengujian Terhadap Hipotesis 6 (mengenai tingkat pendidikan)

Sebahagian besar responden berada pada kategori tingkat pendidikan rendah sampai sedang. Responden yang

berada pada kategori ini mencapai 87.5% . Sejalan dengan itu 70% dari responden mempunyai tingkat kemandirian rendah sampai sedang. Selanjutnya secara uji statistik Jenjang Spearman diperoleh bahwa tingkat pendidikan berpengaruh kuat terhadap tingkat kemandirian. Berarti bahwa pendidikan formal yang telah mereka terima sekalipun rendah telah ikut berperan dalam proses kemandirian mereka. Proses ini diduga berlangsung melalui kepekaan terhadap informasi yang mereka terima dari berbagai pihak.

7. Hasil Pengujian Terhadap Hipotesis 7 (Mengenai Tingkat Pengalaman)

Semua responden yang berada pada kategori tingkat pengalaman tinggi juga mempunyai tingkat kemandirian tinggi. Selain itu secara relatif tingkat kemandirian sejalan dengan tingkat pengalaman dalam bidang Perhutanan Sosial atau sejenisnya. Beberapa petani yang mempunyai tingkat kemandirian tinggi ternyata mereka telah aktif terlibat dalam kegiatan tumpangsari di tanah negara sejak beberapa tahun sebelum dibukanya proyek Perhutanan Sosial.

Berdasarkan uji statistik jenjang Spearman, diperoleh bahwa tingkat pengalaman berpengaruh kuat terhadap tingkat kemandirian petani. Dengan pengalaman ini timbul keyakinan pada dirinya akan manfaat sumberdaya hutan secara lestari. Dalam kaitan itu proyek Perhutanan Sosial bagi mereka (masyarakat sekitar hutan) merupakan tindak lanjut dari adaptasi ekologi yang telah mereka miliki sebelumnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Dalam pelaksanaan proyek Perhutanan Sosial Blok Cileutik masih banyak hambatan terutama dari aspek sikap mayoritas masyarakat sekitarnya. Akibatnya pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya berhasil sesuai dengan yang diharapkan, terutama jika dilihat dari sudut usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
2. Persepsi petugas kehutanan terhadap proyek Perhutanan Sosial masih terlalu berorientasi kepada usaha pencapaian target penghijauan, sedangkan persepsi petani lebih menekankan kepada aspek ekonomi dari sumberdaya hutan

3. Ternyata bahwa tingkat kemandirian anggota KTH lebih tinggi daripada tingkat kemandirian petani non anggota KTH.
4. Faktor-faktor sosial dan ekonomi yang berpengaruh terhadap proses kemandirian petani adalah tingkat pendapatan, luas lahan yang dikuasai, tingkat pendidikan dan pengalaman dalam bidang Perhutanan Sosial atau tumpangsari yang sejenis.

Saran

1. Untuk lebih mensukseskan program Perhutanan Sosial maka perlu adanya pembinaan kepada petani anggota KTH yang berorientasi kepada peningkatan pendapatan petani. Untuk itu kehadiran PLPS sebagai pembina dalam kelompok tani hutan sangat diharapkan.
2. Kontrak kerja yang terlalu singkat (3 tahun) bagi anggota KTH tampaknya perlu ditinjau kembali untuk mempertebal rasa tanggung jawab petani terhadap perhutanan sosial. Disamping itu perlu adanya usaha pengenalan tanaman bawah kepada petani secara ekonomi potensial.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1986. Laporan Pelaksanaan Perhutanan Sosial Tahap I. Administrator Perhutanan Sosial Sub Program Jawa. Departemen Kehutanan Jakarta.
- Nasendi, B.B. 1986. Pengembangan Sumberdaya Manusia di Irian Jaya. Bunga Rampai Perhutanan Sosial. Buku I. 1986. Departemen Kehutanan Jakarta.
- Sajogyo. 1978. Pengaruh Teknologi Terhadap Pembangunan Pedesaan. Pusat Studi Pembangunan. IPB. Bogor.